



PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019



INSPEKTORAT DAERAH



PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

***PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2019***

PEJABAT ESELON II

➤ **INSPEKTUR DAERAH**

INSPEKTORAT DAERAH

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. A. Amar Ma'ruf P., M.Si.**

Jabatan : **Inspektur Daerah**

selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Dr. H. A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si.**

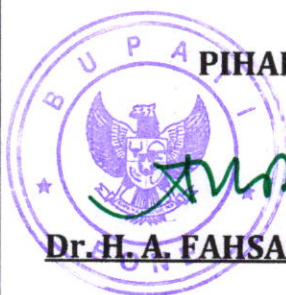
Jabatan : **Bupati Bone**

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 2 Januari 2019



PIHAK KEDUA,

Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si.



PIHAK PERTAMA,

Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19590608 198603 1 015





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTUR DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE

NO.	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENSTRA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	CC (>50 – 60)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3.	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	CC (>50 – 60)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 (Berkembang)
		5. Persentase OPD dan PemDes yang bersih dari temuan tindak pidana korupsi yang material	85 %
5.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	90 %
6.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	90 %
7.	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Perangkat Daerah	8. Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang bersertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	50 %
8.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) Dengan Perbaikan

<u>PROGRAM</u>	<u>ANGGARAN</u>	<u>KETERANGAN</u>
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 1.962.482.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 235.900.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 24.175.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
4. Program Penunjang Pemerintahan Umum	Rp. 44.000.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Rp. 3.350.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 16.500.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 257.626.500,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 455.966.500,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 : Rp. 3.000.000.000,-

Watampone, 2 Januari 2019


BUPATI BONE

Dr. H.A. FAHSAR M. PADJALANG, M.Si.


INSPEKTUR DAERAH

Drs. H.A. AMAR MA'RUF P., M.Si.
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. : 19590608 198603 1 015



PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

PEJABAT ESELON III

- **SEKRETARIS**
- **INSPEKTUR**
- PEMBANTU WILAYAH**

INSPEKTORAT DAERAH

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Ilham, SE., M.Si**
Jabatan : **Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris**
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. A. Amar Ma'ruf P., M.Si.**
Jabatan : **Inspektur Daerah**
selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Watampone, 2 Januari 2019

PIHAK KEDUA,



Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19590608 198603 1 015

PIHAK PERTAMA,



H. ILHAM, SE., M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP. : 19700713 200502 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE

NO.	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENSTRA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	CC (>50 – 60)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3.	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	CC (>50 – 60)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 (Berkembang)
		5. Persentase OPD dan PemDes yang bersih dari temuan tindak pidana korupsi yang material	85 %
5.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	90 %
6.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	90 %
7.	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Perangkat Daerah	8. Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang bersertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	50 %
8.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) Dengan Perbaikan


<u>PROGRAM</u>	<u>ANGGARAN</u>	<u>KETERANGAN</u>
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 1.962.482.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 235.900.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 24.175.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
4. Program Penunjang Pemerintahan Umum	Rp. 44.000.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Rp. 3.350.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 16.500.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 257.626.500,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 455.966.500,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Penunjang untuk Pencapaian Sasaran Strategis.

Watampone, 2 januari 2019

INSPEKTUR DAERAH,


Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19590608 198603 1 015

Plt. SEKRETARIS,


H. ILHAM, S.E., M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP. : 19700713 200502 1 002



Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2019 - Pejabat Eselon III Inspektorat Daerah Kab. Bone

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	TARGET TAHUNAN	TARGET PER TRIWULAN	
1	2	3	4	5	6	
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 1.962.482.000,00	1. Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	55%	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	55%
					Triwulan 4	-
			2. Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	90%	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	90%
			3. Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	(>50-60)	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	>50-60
					Triwulan 4	-
			4. Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	50%	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	50%
					Triwulan 4	-
			5. Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : - BPK-RI - APIP (BPKP, ItProv, ItKab)	- 80% - 80%	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	- 80 % : - 80%
			6. Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	375	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	375
			7. Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	90%	Triwulan 1	25%
					Triwulan 2	50%
					Triwulan 3	75%
					Triwulan 4	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	TARGET TAHUNAN	TARGET PER TRIWULAN	
1	2	3	4	5	6	
			8. Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	90%	Triwulan 1	25%
					Triwulan 2	50%
					Triwulan 3	75%
					Triwulan 4	100%
2.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Rp 235.900.000,00	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	75% (45 Org = 23 L + 22 P)	Triwulan 1	65% (40 Orang)
					Triwulan 2	70% (42 Orang)
					Triwulan 3	73% (44 Orang)
					Triwulan 4	75% (45 Orang)
3.	Program Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Rp 24.175.000,00	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	67% (4 dari 6 elemen)	Triwulan 1	33% (2 / 6 elemen)
					Triwulan 2	50% (3 / 6 elemen)
					Triwulan 3	50% (3 / 6 elemen)
					Triwulan 4	67% (3 / 6 elemen)
4.	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Rp 44.000.000,00	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	100%	Triwulan 1	40%
					Triwulan 2	50%
					Triwulan 3	75%
					Triwulan 4	100%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 3.350.000,00	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	100 % (7 Jenis Dokumen)	Triwulan 1	65%
					Triwulan 2	75%
					Triwulan 3	85%
					Triwulan 4	100%
6.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 16.500.000,00	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100%	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	100%
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	-
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 257.626.500,00	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100%	Triwulan 1	25%
					Triwulan 2	25%
					Triwulan 3	25%
					Triwulan 4	25%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	TARGET TAHUNAN	TARGET PER TRIWULAN	
1	2	3	4	5	6	
8.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 455.966.500,00	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah selama 1 Tahun Anggaran sesuai dengan Perencanaan	100%	Triwulan 1	25%
					Triwulan 2	25%
					Triwulan 3	25%
					Triwulan 4	25%

Watampone, 2 Januari 2019

Plt. SEKRETARIS,



H. HAHAM, S.E., M.Si.

Pangkat : Pembina

NIP. : 19700713 200502 1 002



INSPEKTUR DAERAH,

Drs. H. A. AMAR MARUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19590608 198603 1 015

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. Nur Zulaeha Damai, SE., MTP.**

Jabatan : **Inspektur Pembantu Wilayah I**

selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Drs. H. A. Amar Ma'ruf P., M.Si.**

Jabatan : **Inspektur Daerah**

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 2 Januari 2019



PIHAK KEDUA,

Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19590608 198603 1 015

PIHAK PERTAMA,

Hj. NUR ZULAEHA DAMAL SE., MTP.

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP. : 19690626 199303 2 010



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE**

NO.	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENSTRA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	CC (>50 – 60)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3.	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	CC (>50 – 60)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 (Berkembang)
		5. Persentase OPD dan PemDes yang bersih dari temuan tindak pidana korupsi yang material	85 %
5.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	90 %
6.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	90 %
7.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) Dengan Perbaikan

<u>PROGRAM</u>	<u>ANGGARAN</u>	<u>KETERANGAN</u>
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 1.962.482.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 235.900.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 24.175.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.


Watampone, 2 Januari 2019

INSPEKTUR DAERAH,



Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19590608 198603 1 015

INSPEKTUR PEMBANTU WIL. I,



Hj. NUR ZULAEHA DAMAL SE., MTP.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. : 19690626 199303 2 010

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	TARGET TAHUNAN	TARGET PER TRIWULAN	
1	2	3	4	5	6	
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 1.962.482.000,00	1. Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	55%	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	55%
					Triwulan 4	-
			2. Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	90%	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	90%
			3. Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	(>50-60)	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	>50-60
					Triwulan 4	-
			4. Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	50%	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	50%
					Triwulan 4	-
			5. Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : - BPK-RI - APIP (BPKP, ItProv, ItKab)	- 80% - 80%	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	- 80 % : - 80%
			6. Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	375	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	375
			7. Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	90%	Triwulan 1	25%
					Triwulan 2	50%
					Triwulan 3	75%
					Triwulan 4	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	TARGET TAHUNAN	TARGET PER TRIWULAN	
1	2	3	4	5	6	
			8. Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	90%	Triwulan 1	25%
					Triwulan 2	50%
					Triwulan 3	75%
					Triwulan 4	100%

Watampone, 2 Januari 2019

INSPEKTUR PEMBANTU WIL. I

Hj. NUR ZULAIHA DAMAI, S.E., M.TP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19690626 199303 2 010



INSPEKTUR DAERAH

Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19590608 198603 1 015

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Haslindah D., SH., M.Si.**
Jabatan : **Inspektur Pembantu Wilayah III**
selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Drs. H. A. Amar Ma'ruf P., M.Si.**
Jabatan : **Inspektur Daerah**
selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 2 Januari 2019



PIHAK KEDUA,

Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19590608 198603 1 015

PIHAK PERTAMA,

A. HASLINDAH D., SH., M.Si.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. : 19670523 199703 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE**

NO.	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENSTRA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	CC (>50 – 60)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3.	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	CC (>50 – 60)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 (Berkembang)
		5. Persentase OPD dan PemDes yang bersih dari temuan tindak pidana korupsi yang material	85 %
5.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	90 %
6.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	90 %
7.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) Dengan Perbaikan

<u>PROGRAM</u>	<u>ANGGARAN</u>	<u>KETERANGAN</u>
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 1.962.482.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 235.900.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 24.175.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Program Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis.



INSPEKTUR DAERAH,

Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19590608 198603 1 015

Watampone, 2 Januari 2019

INSPEKTUR PEMBANTU WIL. III,

A. HASLINDAH D., SH., M.Si.

Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. : 19670523 199703 2 004

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	TARGET TAHUNAN	TARGET PER TRIWULAN	
1	2	3	4	5	6	
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 1.962.482.000,00	1. Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	55%	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	55%
					Triwulan 4	-
			2. Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	90%	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	90%
			3. Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	(>50-60)	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	>50-60
					Triwulan 4	-
			4. Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	50%	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	50%
					Triwulan 4	-
			5. Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) :	- 80%	Triwulan 1	-
			- BPK-RI	- 80%	Triwulan 2	-
			- APIP (BPKP, ItProv, ItKab)		Triwulan 3	-
					Triwulan 4	- 80 % : - 80%
			6. Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	375	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	375
			7. Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	90%	Triwulan 1	25%
					Triwulan 2	50%
					Triwulan 3	75%
					Triwulan 4	100%

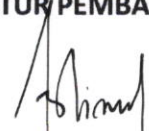
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	TARGET TAHUNAN	TARGET PER TRIWULAN	
1	2	3	4	5	6	
			8. Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	90%	Triwulan 1	25%
					Triwulan 2	50%
					Triwulan 3	75%
					Triwulan 4	100%


INSPEKTUR DAERAH

Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. : 19590608 198603 1 015

Watampone, 2 Januari 2019

INSPEKTUR PEMBANTU WIL. III


A. HASLINDAH D., S.H, M.Si.
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. : 19670523 199703 2 004



PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

PEJABAT ESELON IV

- KASUBAG. PERENCANAAN
- KASUBAG. ADMINISTRASI &
UMUM
- KASUBAG. EVALUASI &
PELAPORAN

INSPEKTORAT DAERAH

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muh. Kafrawi Samad, ST.**

Jabatan : **Kasubag. Perencanaan**

selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Drs. H. A. Amar Ma'ruf P., M.Si.**

Jabatan : **Inspektur Daerah**

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 2 Januari 2019



PIHAK KEDUA,

Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19590608 198603 1 015

PIHAK PERTAMA,

MUH. KAFRAWI SAMAD, ST.

Pangkat : Penata Tingkat I

NIP. : 19780202 200604 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KASUBAG. PERENCANAAN
INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE

NO.	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENSTRA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	CC (>50 – 60)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3.	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	CC (>50 – 60)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 (Berkembang)
		5. Persentase OPD dan PemDes yang bersih dari temuan tindak pidana korupsi yang material	85 %
5.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	90 %
6.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	90 %
7.	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Perangkat Daerah	8. Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang bersertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	50 %
8.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) Dengan Perbaikan

<u>KEGIATAN</u>	<u>ANGGARAN</u>	<u>KETERANGAN</u>
1. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Rp. 200.000.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis
2. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Rp. 35.900.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis
3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Rp. 24.175.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis
4. Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Rp. 6.000.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
5. Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Rp. 38.000.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
6. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.975.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
7. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Rp. 1.375.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis

Watampone, 2 Januari 2019



INSPEKTUR DAERAH,

Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19590608 198603 1 015

KASUBAG. PERENCANAAN,

MUH. KAFRAWI SAMAD, ST.

Pangkat : Penata Tingkat I
NIP. : 19780202 200604 1 007



PERJANJIAN KINERJA KASUBAG. PERENCANAAN - INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE
PERIODE 2018-2023
TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2019 - Pejabat Eselon IV Inspektorat Daerah Kab. Bone

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET TAHUNAN			TARGET PER TRIWULAN			
			TARGET KINERJA	FISIK	KEUANGAN	TRIWULAN	TARGET KINERJA	FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan diklat/bimtek pembentukan/ penjenjangan ahli dan pengembangan profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan sesuai dengan rencana kebutuhan penganggaran	18 Kegiatan	-	Rp 200.000.000,00	Triwulan 1	4 Kegiatan	-	Rp 55.000.000,00
						Triwulan 2	5 Kegiatan	-	Rp 55.000.000,00
						Triwulan 3	4 Kegiatan	-	Rp 45.000.000,00
						Triwulan 4	5 Kegiatan	-	Rp 45.000.000,00
2.	Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal sesuai dengan rencana kebutuhan penganggaran	2 PKS	-	Rp 35.900.000,00	Triwulan 1	-	-	-
						Triwulan 2	1 PKS	-	Rp 17.950.000,00
						Triwulan 3	1 PKS	-	Rp 17.950.000,00
						Triwulan 4	-	-	-
3.	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah jenis infrastruktur yang tersusun/ disempurnakan dokumennya untuk peningkatan Kapabilitas APiP menuju Level 3 hingga tahun berkenaan	20 Jenis	-	Rp 24.175.000,00	Triwulan 1	3 Jenis	-	Rp 1.050.000,00
						Triwulan 2	5 Jenis	-	Rp 1.050.000,00
						Triwulan 3	6 Jenis	-	Rp 1.050.000,00
						Triwulan 4	6 Jenis	-	Rp 21.025.000,00
4.	Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan kinerja dan anggaran Inspektorat Daerah yang tersusun selama satu tahun anggaran	7 Jenis Dokumen : PKPT, Renja, Renstra, Perjanjian Kinerja, RKA-SKPD, DPA-SKPD, DPPA-SKPD	-	Rp 6.000.000,00	Triwulan 1	2 Jenis Dokumen	-	Rp 1.500.000,00
						Triwulan 2	1 Jenis Dokumen	-	Rp 1.500.000,00
						Triwulan 3	2 Jenis Dokumen	-	Rp 1.500.000,00
						Triwulan 4	2 Jenis Dokumen	-	Rp 1.500.000,00
5.	Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Website Perangkat Daerah yang dikelola dalam satu tahun anggaran	1 Website	-	Rp 38.000.000,00	Triwulan 1	1 Website	-	Rp 35.750.000,00
						Triwulan 2	1 Website	-	Rp 750.000,00
						Triwulan 3	1 Website	-	Rp 750.000,00
						Triwulan 4	1 Website	-	Rp 750.000,00
6.	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun selama satu tahun anggaran	4 Jenis Dokumen : LKj-IP, Data LPPD/LKPJ, Evaluasi Renja, Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	-	Rp 1.975.000,00	Triwulan 1	3 Jenis Dokumen	-	Rp 600.000,00
						Triwulan 2	2 Jenis Dokumen	-	Rp 500.000,00
						Triwulan 3	1 Jenis Dokumen	-	Rp 500.000,00
						Triwulan 4	2 Jenis Dokumen	-	Rp 375.000,00

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET TAHUNAN			TARGET PER TRIWULAN			
			TARGET KINERJA	FISIK	KEUANGAN	TRIWULAN	TARGET KINERJA	FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah jenis dokumen pelaporan keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun selama satu tahun anggaran	3 Jenis Dokumen : - Lap. Keuangan - SPJ Keuangan - Laporan Realisasi Fisik & Keuangan	-	Rp 1.375.000,00	Triwulan 1	2 Jenis Dokumen	-	Rp 375.000,00
						Triwulan 2	3 Jenis Dokumen	-	Rp 375.000,00
						Triwulan 3	2 Jenis Dokumen	-	Rp 325.000,00
						Triwulan 4	3 Jenis Dokumen	-	Rp 300.000,00



INSPEKTUR DAERAH

Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19590608 198603 1 015

Watampone, 2 Januari 2019

KASUBAG. PERENCANAAN

MUH. KAFRAWI SAMAD, S.T.

Pangkat : Penata Tingkat I

NIP. : 19780202 200604 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Mattalatta, S.E., M.Si.**
Jabatan : **Pelaksana Harian (Plh.) Kasubag. Administrasi & Umum**
selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Drs. H. A. Amar Ma'ruf P., M.Si.**
Jabatan : **Inspektur Daerah**
selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 2 Januari 2019



PIHAK KEDUA,

Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19590608 198603 1 015

PIHAK PERTAMA,

A. MATTALATTA, S.E., M.Si.

Pangkat : Penata Muda Tingkat I

NIP. : 19820429 201101 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KASUBAG. ADMINISTRASI DAN UMUM
INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE

NO.	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENSTRA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	CC (>50 – 60)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3.	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	CC (>50 – 60)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 (Berkembang)
		5. Persentase OPD dan PemDes yang bersih dari temuan tindak pidana korupsi yang material	85 %
5.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	90 %
6.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	90 %
7.	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Perangkat Daerah	8. Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang bersertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	50 %
8.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) Dengan Perbaikan

<u>KEGIATAN</u>	<u>ANGGARAN</u>	<u>KETERANGAN</u>
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp. 19.980.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 65.160.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
3. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 5.100.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
4. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 31.225.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
5. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Rp. 220.000.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
6. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp. 114.501.500,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
7. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp. 60.000.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
8. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 27.500.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
9. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 39.200.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
10. Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Rp. 24.750.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 23.426.500,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp. 60.250.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 7.500.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 10.000.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Gedung Kantor	Rp. 5.000.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
16. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Rp. 16.500.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis

Watampone, 5 Maret 2019

PIh. KASUBAG. ADMINISTRASI & UMUM,



INSPEKTUR DAERAH,

Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19590608 198603 1 015

A. MATTALATTA, S.E., M.Si.

Pangkat : Penata Muda Tingkat I
NIP. : 19820429 201101 1 014



PERJANJIAN KINERJA KASUBAG. ADMINISTRASI & UMUM - INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE
PERIODE 2018-2023
TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2019 - Pejabat Eselon IV Inspektorat Daerah Kab. Bone

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET TAHUNAN			TARGET PER TRIWULAN			
			TARGET KINERJA	FISIK	KEUANGAN	TRIWULAN	TARGET KINERJA	FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah paket pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan penganggaran	1 Paket (1 Jenis Pakaian)	100%	Rp 16.500.000,00	Triwulan 1	1 Paket (Pakaian Batik seragam)	100%	Rp 16.500.000,00
						Triwulan 2	-	-	-
						Triwulan 3	-	-	-
						Triwulan 4	-	-	-
2.	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional sesuai rencana kebutuhan penganggaran	3 Unit Sepeda Motor	100%	Rp 60.000.000,00	Triwulan 1	-	-	-
						Triwulan 2	3 Unit Sepeda Motor	100%	Rp 60.000.000,00
						Triwulan 3	-	-	-
						Triwulan 4	-	-	-
3.	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran	2 Paket/Set (2 Jenis)	100%	Rp 27.500.000,00	Triwulan 1	1 Paket Gorden, 1 Set Mic Wireless	100%	Rp 27.500.000,00
						Triwulan 2	-	-	-
						Triwulan 3	-	-	-
						Triwulan 4	-	-	-
4.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran	18 Unit/Set (7 Jenis)	100%	Rp 39.200.000,00	Triwulan 1	1 Unit PC Desktop 2 Unit Printer 2 Unit Scanner	83%	Rp 22.700.000,00
						Triwulan 2	1 Alat Penghancur Kertas 4 Unit Meter Dorong 4 Unit Roll Meter 4 Jangka Sorong	17%	Rp 16.500.000,00
						Triwulan 3	-	-	-
						Triwulan 4	-	-	-

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET TAHUNAN			TARGET PER TRIWULAN			
			TARGET KINERJA	FISIK	KEUANGAN	TRIWULAN	TARGET KINERJA	FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur sesuai rencana kebutuhan penganggaran	20 Buah (2 Jenis)	100%	Rp 24.750.000,00	Triwulan 1	-	-	-
						Triwulan 2	15 Buah Kursi Rapat 5 Buah Lemari Arsip	100%	Rp 24.750.000,00
						Triwulan 3	-	-	-
						Triwulan 4	-	-	-
6.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan/perlengkapan pemeliharaan kebersihan dan pekerjaan perbaikan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran	5 Paket	-	Rp 23.426.500,00	Triwulan 1	1 Paket	-	Rp 1.256.000,00
						Triwulan 2	1 Paket	-	Rp 593.500,00
						Triwulan 3	2 Paket	-	Rp 20.983.500,00
						Triwulan 4	1 Paket	-	Rp 593.500,00
7.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajak tahunan (STNK) secara rutin setiap tahun anggaran	32 Unit (2 Mobil dan 30 Motor)	-	Rp 60.250.000,00	Triwulan 1	5 Unit Motor	-	Rp 19.687.500,00
						Triwulan 2	1 Unit Mobil + 5 Unit Motor	-	Rp 10.437.500,00
						Triwulan 3	5 Unit Motor	-	Rp 17.687.500,00
						Triwulan 4	1 Unit Mobil + 5 Unit Motor	-	Rp 12.437.500,00
8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	5 Jenis Pemeliharaan (AC, Pintu/Jendela, Instalasi Listrik, Telepon, dan Air Bersih)	-	Rp 7.500.000,00	Triwulan 1	5 Jenis	-	Rp 1.750.000,00
						Triwulan 2	5 Jenis	-	Rp 2.000.000,00
						Triwulan 3	5 Jenis	-	Rp 1.750.000,00
						Triwulan 4	5 Jenis	-	Rp 2.000.000,00
9.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	3 Jenis Pekerjaan Pemeliharaan (PC Desktop, Notebook, Printer)	-	Rp 10.000.000,00	Triwulan 1	Sesuai Keperluan (insidentil)	-	Rp 2.500.000,00
						Triwulan 2	Sesuai Keperluan (insidentil)	-	Rp 2.500.000,00
						Triwulan 3	Sesuai Keperluan (insidentil)	-	Rp 2.500.000,00
						Triwulan 4	Sesuai Keperluan (insidentil)	-	Rp 2.500.000,00

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET TAHUNAN			TARGET PER TRIWULAN			
			TARGET KINERJA	FISIK	KEUANGAN	TRIWULAN	TARGET KINERJA	FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleurn Gedung Kantor	Jumlah jenis meubeleurn gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggarn	3 Jenis Pekerjaan Pemeliharaan (Almari, Meja dan Kursi)	-	Rp 5.000.000,00	Triwulan 1	Sesuai Keperluan (insidentil)	-	Rp 1.500.000,00
						Triwulan 2	Sesuai Keperluan (insidentil)	-	Rp 1.000.000,00
						Triwulan 3	Sesuai Keperluan (insidentil)	-	Rp 1.500.000,00
						Triwulan 4	Sesuai Keperluan (insidentil)	-	Rp 1.000.000,00
11.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan penganggarn	36 Paket (3 Jenis Paket Per Bulan)	-	Rp 19.980.000,00	Triwulan 1	9 Paket (3 Paket Per Bulan)	-	Rp 4.995.000,00
						Triwulan 2	9 Paket (3 Paket Per Bulan)	-	Rp 4.995.000,00
						Triwulan 3	9 Paket (3 Paket Per Bulan)	-	Rp 4.995.000,00
						Triwulan 4	9 Paket (3 Paket Per Bulan)	-	Rp 4.995.000,00
12.	Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Jumlah tenaga jasa administrasi/ jasa teknis lainnya yang bekerja untuk pengelolaan administrasi keuangan dan barang/aset perangkat daerah selama satu tahun anggarann	12 Orang (Per Bulan)	-	Rp 65.160.000,00	Triwulan 1	12 Orang (Per Bulan)	-	Rp 16.290.000,00
						Triwulan 2	12 Orang (Per Bulan)	-	Rp 16.290.000,00
						Triwulan 3	12 Orang (Per Bulan)	-	Rp 16.290.000,00
						Triwulan 4	12 Orang (Per Bulan)	-	Rp 16.290.000,00
13.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai rencana kebutuhan penganggarn	4 Paket (1 Paket Per Triwulan)	-	Rp 5.100.000,00	Triwulan 1	1 Paket (Per triwulan)	-	Rp 1.347.500,00
						Triwulan 2	1 Paket (Per triwulan)	-	Rp 1.305.000,00
						Triwulan 3	1 Paket (Per triwulan)	-	Rp 1.237.500,00
						Triwulan 4	1 Paket (Per triwulan)	-	Rp 1.210.000,00
14.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan penganggarn	12 Paket (1 Paket Per Bulan)	-	Rp 31.225.000,00	Triwulan 1	3 Paket (1 Paket Per Bulan)	-	Rp 7.806.250,00
						Triwulan 2	3 Paket (1 Paket Per Bulan)	-	Rp 7.806.250,00
						Triwulan 3	3 Paket (1 Paket Per Bulan)	-	Rp 7.806.250,00
						Triwulan 4	3 Paket (1 Paket Per Bulan)	-	Rp 7.806.250,00
15.	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama satu tahun anggarann	47 Kegiatan	-	Rp 220.000.000,00	Triwulan 1	12 Kegiatan	-	Rp 56.500.000,00
						Triwulan 2	12 Kegiatan	-	Rp 56.500.000,00
						Triwulan 3	12 Kegiatan	-	Rp 56.000.000,00
						Triwulan 4	12 Kegiatan	-	Rp 51.000.000,00

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET TAHUNAN			TARGET PER TRIWULAN			
			TARGET KINERJA	FISIK	KEUANGAN	TRIWULAN	TARGET KINERJA	FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor (ATK), barang cetakan & penggandaan, serta makanan & minuman sesuai rencana kebutuhan penganggaran	36 Paket (3 Paket Per Bulan)	-	Rp 114.501.500,00	Triwulan 1	9 Paket (3 Paket Per Bulan)	-	Rp 30.039.000,00
						Triwulan 2	9 Paket (3 Paket Per Bulan)	-	Rp 27.667.250,00
						Triwulan 3	9 Paket (3 Paket Per Bulan)	-	Rp 29.312.750,00
						Triwulan 4	9 Paket (3 Paket Per Bulan)	-	Rp 27.482.500,00



INSPEKTUR DAERAH

Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19590608 198603 1 015

Watampone, 2 Januari 2019

Plh. KASUBAG.

ADMINISTRASI & UMUM

A. MATTALATTA, S.E., M.Si.

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP. : 19820429 201101 1 014

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Ilham, SE., M.Si.**
Jabatan : **Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan**
selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Drs. H. A. Amar Ma'ruf P., M.Si.**
Jabatan : **Inspektur Daerah**
selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Watampone, 2 Januari 2019



PIHAK KEDUA,

Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19590608 198603 1 015

PIHAK PERTAMA,


H. ILHAM, SE., M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP. : 19700713 200502 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KASUBAG. EVALUASI DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE**

NO.	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENSTRA 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	CC (>50 – 60)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3.	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	CC (>50 – 60)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 (Berkembang)
		5. Persentase OPD dan PemDes yang bersih dari temuan tindak pidana korupsi yang material	85 %
5.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	90 %
6.	Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	90 %
7.	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Perangkat Daerah	8. Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang bersertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	50 %
8.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) Dengan Perbaikan

<u>KEGIATAN</u>	<u>ANGGARAN</u>	<u>KETERANGAN</u>
1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Rp. 1.548.565.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis
2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Rp. 117.161.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis
3. Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Rp. 117.161.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis
4. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Rp. 8.000.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis
5. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Rp. 93.350.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis
6. Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Rp. 78.245.000,-	Sumber Dana : DAU-APBD T. A. 2019 Kegiatan Prioritas Pencapaian Sasaran Strategis


Watampone, 2 Januari 2019

INSPEKTUR DAERAH,



Dts. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19590608 198603 1 015

KASUBAG. EVALUASI & PELAPORAN,



H. UHAM, SE., M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP. : 19700713 200502 1 002



PERJANJIAN KINERJA KASUBAG. EVALUASI & PELAPORAN - INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE
PERIODE 2018-2023
TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2019 - Pejabat Eselon IV Inspektorat Daerah Kab. Bone

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET TAHUNAN			TARGET PER TRIWULAN			
			TARGET KINERJA	FISIK	KEUANGAN	TRIWULAN	TARGET KINERJA	FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	4 Laporan Triwulan	-	Rp 1.548.565.000,00	Triwulan 1	1 Laporan Triwulan	-	Rp 419.000.000,00
						Triwulan 2	1 Laporan Triwulan	-	Rp 430.815.000,00
						Triwulan 3	1 Laporan Triwulan	-	Rp 381.500.000,00
						Triwulan 4	1 Laporan Triwulan	-	Rp 317.250.000,00
2.	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik selama satu tahun anggaran	4 Laporan Triwulan	-	Rp 8.000.000,00	Triwulan 1	1 Laporan Triwulan	-	Rp 750.000,00
						Triwulan 2	1 Laporan Triwulan	-	Rp 5.750.000,00
						Triwulan 3	1 Laporan Triwulan	-	Rp 750.000,00
						Triwulan 4	1 Laporan Triwulan	-	Rp 750.000,00
3.	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan secara periodik selama satu tahun anggaran	4 Laporan Triwulan	-	Rp 93.350.000,00	Triwulan 1	1 Laporan Triwulan	-	Rp 26.100.000,00
						Triwulan 2	1 Laporan Triwulan	-	Rp 25.850.000,00
						Triwulan 3	1 Laporan Triwulan	-	Rp 20.850.000,00
						Triwulan 4	1 Laporan Triwulan	-	Rp 20.550.000,00
4.	Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten selama satu tahun anggaran	1 Kegiatan	-	Rp 78.245.000,00	Triwulan 1	-	-	-
						Triwulan 2	-	-	-
						Triwulan 3	-	-	-
						Triwulan 4	1 Kegiatan	-	Rp 78.245.000,00
5.	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah selama satu tahun anggaran	4 Laporan Triwulan	-	Rp 117.161.000,00	Triwulan 1	1 Laporan Triwulan	-	Rp 30.545.000,00
						Triwulan 2	1 Laporan Triwulan	-	Rp 30.540.000,00
						Triwulan 3	1 Laporan Triwulan	-	Rp 30.545.000,00
						Triwulan 4	1 Laporan Triwulan	-	Rp 25.531.000,00

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)	TARGET TAHUNAN			TARGET PER TRIWULAN			
			TARGET KINERJA	FISIK	KEUANGAN	TRIWULAN	TARGET KINERJA	FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah selama satu tahun anggaran	4 Laporan Triwulan	-	Rp 117.161.000,00	Triwulan 1	1 Laporan Triwulan	-	Rp 30.545.000,00
						Triwulan 2	1 Laporan Triwulan	-	Rp 30.540.000,00
						Triwulan 3	1 Laporan Triwulan	-	Rp 30.545.000,00
						Triwulan 4	1 Laporan Triwulan	-	Rp 25.531.000,00



INSPEKTUR DAERAH

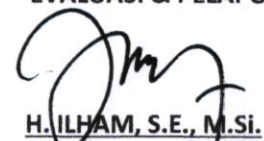
Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19590608 198603 1 015

Watampone, 2 Januari 2019

KASUBAG.

EVALUASI & PELAPORAN



H. ILHAM, S.E., M.Si.

Pangkat : Pembina
NIP. : 19700713 200502 1 002